

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. 1. Latar Belakang Masalah**

Kota Bandung merupakan salah satu tujuan wisata bagi wisatawan lokal terutama yang berada di Pulau Jawa dalam mengisi liburan akhir pekan dan libur panjang seperti Natal dan Tahun Baru. Visi Kota Bandung adalah “Bandung Kota Jasa BERMARTABAT (Kota Jasa yang memiliki Harga Diri, Kehormatan, Keadilan, dan Harkat kemanusiaan)”. Secara harfiah, Bermartabat diartikan sebagai harkat atau harga diri yang menunjukkan eksistensi masyarakat kota yang dapat dijadikan teladan karena kebersihan, kemakmuran, dan ketaatan. Berdasarkan pemahaman tersebut, sangatlah diperlukan langkah dan tindakan pemantapan yang mandiri (revitalisasi, reaktualisasi, dan refungsionalisasi) yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dalam era Otonomi Daerah yang sudah berlangsung sejak tahun 2001 lalu.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bandung Priana Wirasaputra menjelaskan, sektor pariwisata merupakan salah satu penyumbang besar terhadap kantong Pendapatan Asli Daerah. (PRO3RRI Senin, 26 Juli 2010 10:29). Sesuai dengan Visi Kota Bandung yang menjadikan Bandung sebagai Kota Jasa dimana jasa terbesar yang ditawarkan diantaranya adalah wahana wisata hiburan keluarga, belanja, dan kuliner. Maka Pajak hiburan yang memiliki tarif pajak terbesar sesuai dengan UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, dianggap dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Bandung.

Hiburan adalah potensi yang cukup besar yang dimiliki Kota Bandung, setidaknya tercermin dari banyaknya kendaraan yang masuk ke Kota Bandung lewat jalur tol dalam sehari ketika hari libur. Kepala Gerbang Tol Pasteur, Nazwar Irawan mengatakan bahwa pada pukul 14.00 WIB, mereka mencatat kendaraan yang masuk sebanyak 14.238 unit dan satu jam kemudian meningkat 2.188 unit.

(15 May 2010, Pikiran Rakyat <http://bataviase.co.id> )

Sarana transportasi sangat berpengaruh terhadap minat wisatawan untuk berkunjung ke Bandung. Tol Cipularang memberikan andil yang sangat besar terhadap warga Jakarta untuk datang ke Bandung. Jarak tempuh yang biasanya 5 jam menjadi 2 jam menjadi daya tarik tersendiri bagi warga ibukota untuk menikmati liburan di Bandung. Hal ini ditunjang pula dengan adanya jalan layang Pasupati yang mempermudah akses menuju kawasan Jl. Dago dan Riau. Bagi wisatawan mancanegara transportasi dipermudah dengan adanya Bandara Husein Sastranegara. Wisatawan asing yang paling banyak datang ke Bandung melalui Bandara Husein yaitu dari Malaysia dan Brunei.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jawa Barat, Herdiwan Ing Suranta di Bandung, mengatakan bahwa jumlah wisatawan yang masuk melalui destinasi Bandara Husein Sastranegara Kota Bandung mencapai 8.440 orang. Selain dari Malaysia, juga berasal dari Singapura, Brunei, Australia, Belanda, Jerman, Eropa dan dari beberapa negara Timur Tengah. (Rabu, 7 Juli 2010 10:41 WIB, [www.antaranews.com](http://www.antaranews.com) )

Dari data-data tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa Kota Bandung mempunyai predikat sebagai kota niaga dan wisatawan di Jawa Barat, menjadi magnet tersendiri bagi mereka yang ingin datang berkunjung. Dengan predikat yang disandang tersebut, kota yang dijuluki *Paris van Java* ini, menjadikan jumlah kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara setiap minggunya cukup besar. Akibat tingginya jumlah wisatawan yang datang ke Kota Bandung, menjadikan perputaran uang di kota ini, khususnya saat akhir pekan maupun libur panjang cukup besar.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Kadisparbud) Kota Bandung, Priyana Wirasaputra, mengatakan selama sebulan setiap orang rata-rata mengeluarkan uang minimal sebesar Rp. 500 ribu untuk kebutuhan wisata.

(Selasa, 23 Juni 2009, <http://antarajawabarat.com> ). Hal-hal tersebut merupakan fakta bahwa Kota Bandung merupakan kota jasa yang menawarkan banyak sarana hiburan baik untuk wisatawan lokal maupun mancanegara, sehingga Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari pajak daerah sektor hiburan pantas dilirik dalam upaya pengoptimalan potensi daerah guna meningkatkan kemandirian daerah di masa otonomi ini.

Sejauh ini, sistem desentralisasi yang sudah dijalankan di Indonesia selama satu dekade nampak belum mencerminkan kemandirian seperti apa yang diharapkan. Pada kenyataannya Dana Perimbangan merupakan sumber utama Pendapatan Daerah, setidaknya berkisar antara 80-95% dari total aliran dana masuk ke kas daerah (Media Indonesia 10 September, 2008). Bahkan kota besar

seperti Bandung pun masih mengalami ketergantungan terhadap Dana Perimbangan. Hal tersebut terlihat dari tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Jumlah Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah**  
**Kota Bandung Tahun Anggaran 2001-2008**  
**(Dalam Rupiah)**

Tahun	Dana Perimbangan	Pertumbuhan %	Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan %	Perbandingan PAD dengan Dana Perimbangan %
2001	471.988.159.296,47		123.984.485.749,23		26%
2002	526.004.617.855,00	11,44%	182.064.238.544,02	46,84%	35%
2003	706.085.650.700,25	34,24%	213.029.461.862,25	17,01%	30%
2004	860.471.704.276,00	21,87%	222.909.941.952,75	4,64%	26%
2005	861.550.818.511,00	0,13%	225.596.438.613,00	1,21%	26%
2006	1.139.910.819.397,00	32,31%	253.882.919.542,87	12,54%	22%
2007	1.097.176.115.000,00	-3,75%	287.555.539.000,00	13,26%	26%
2008	1.360.460.067.955,00	24,00%	314.627.155.412,00	9,41%	23%
2009	1.321.249.068.000,00	-2,88%	385.206.446.981,00	22,43%	29%
2010	1.554.367.007.954,00	17,64%	440.331.559.083,00	14,31%	28%

*Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung tahun 2001-2008*

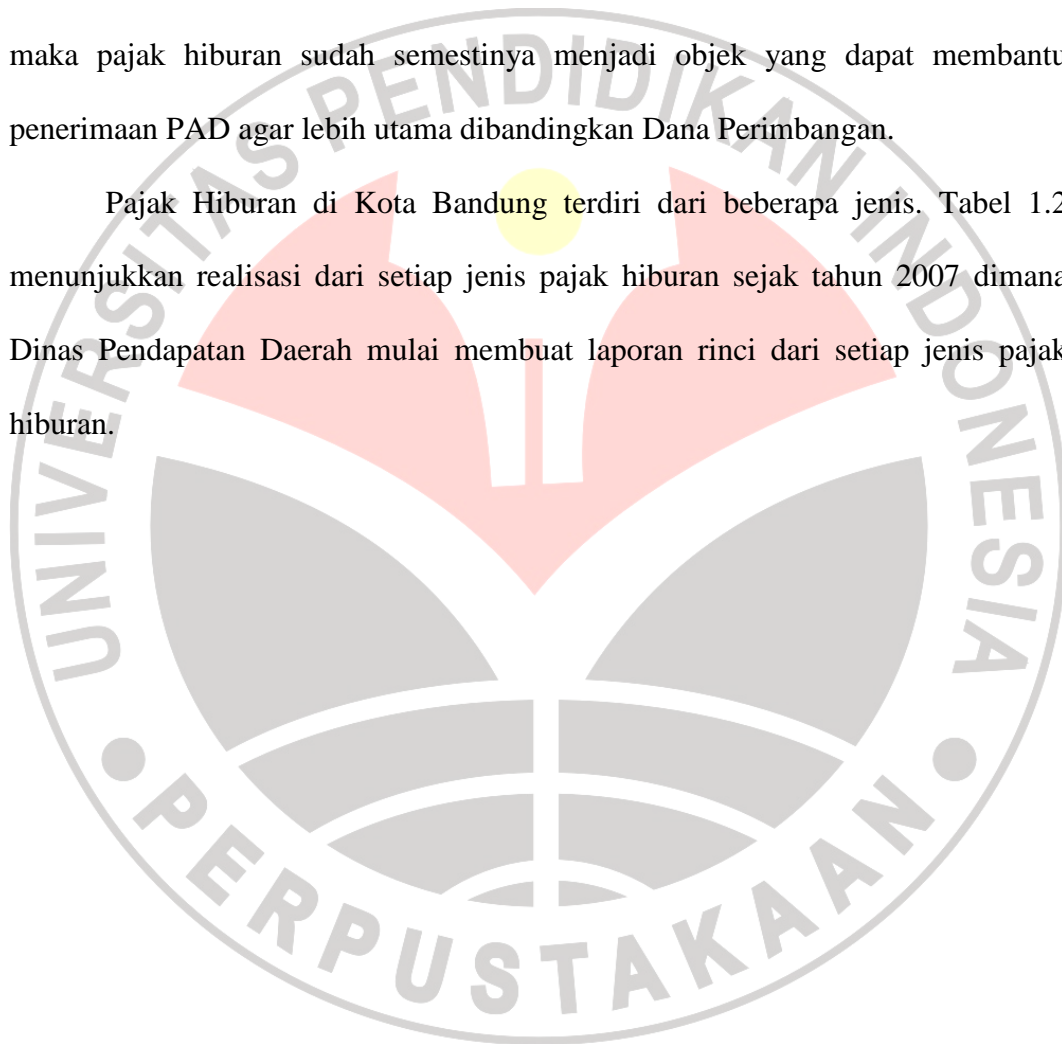
Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa kebutuhan Kota Bandung pada Dana Perimbangan fluktuatif, begitu juga dengan pertumbuhan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung masih fluktuatif. Pada tahun 2002, PAD mengalami pertumbuhan yang besar namun kemudian di tahun berikutnya menurun drastis terus menerus sampai tahun 2005. Pada tahun 2006 setelah banyak fasilitas yang mendukung Bandung sebagai kota wisata, potensi Bandung semakin meningkat dalam menarik wisatawan. Namun, dengan segala fasilitas dan potensi wisata yang dimiliki, ternyata masih belum signifikan membantu pertumbuhan PAD kota Bandung, bahkan kembali turun di tahun 2008.

Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung tidak pernah mencapai 50% dari Dana Perimbangan, yang berarti

Penerimaan Daerah Kota Bandung belum partisipatif yang berarti kemampuan penerimaan PAD Kota Bandung belum cukup memberikan pengaruh yang besar terhadap total Pendapatan Daerah.

Dengan melihat latar belakang kota Bandung sebagai kota jasa yang menawarkan banyak jasa hiburan seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, maka pajak hiburan sudah semestinya menjadi objek yang dapat membantu penerimaan PAD agar lebih utama dibandingkan Dana Perimbangan.

Pajak Hiburan di Kota Bandung terdiri dari beberapa jenis. Tabel 1.2 menunjukkan realisasi dari setiap jenis pajak hiburan sejak tahun 2007 dimana Dinas Pendapatan Daerah mulai membuat laporan rinci dari setiap jenis pajak hiburan.



**Tabel 1.2**  
**Tabel Realisasi Pajak-Pajak Hiburan**

<b>Pajak</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
<b>Bioskop</b>	<b>5.343.123.604</b>	<b>7.653.375.575</b>	<b>7.955.681.456</b>	<b>8.198.351.714</b>
Pagelaran Kesenian	28.100.000	115.127.450	122.940.200	184.659.400
Diskotik	844.681.410	1.410.890.889	1.386.859.656	1.561.210.100
Karaoke	4.132.087.797	4.856.178.426	6.246.397.084	8.399.500.314
Klub Malam	770.867.818	817.302.551	959.622.187	966.674.191
Sirkus/Akrobat	-	-	-	-
Bilyard	912.404.377	971.080.570	1.008.167.542	1.584.276.452
Bowling	272.764.340	191.713.950	211.101.525	54.950.527
Permainan Ketangkasan	1.006.193.004	1.218.605.227	1.219.973.926	1.987.673.900
Panti Pijat/Refleksi	1.085.577.680	1.353.026.989	1.790.944.999	2.284.275.483
Fitness	145.840.141	141.877.572	149.442.929	153.876.068
Pertandingan Olahraga	164.413.521	66.966.130	79.593.576	109.128.188
Tempat Rekreasi	685.452.980	812.003.420	1.000.134.190	848.718.180
Kolam Renang	399.139.393	387.078.186	401.095.536	432.309.410
Gedung Kesenian	534.000	554.350	1.930.000	-
Insd Malam Tahun Baru			6.241.850	1.862.500

*Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung*

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi dari Pajak Hiburan sektor Bioskop merupakan Pajak Daerah yang memberikan kontribusi besar dari tahun ke tahun. Dalam buku laporan Dispenda Dalam Angka, tercatat ada 11 bioskop yang tersebar di pusat-pusat hiburan Kota Bandung.

Oleh karena itu, Pajak hiburan sektor bioskop dinilai dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap Pajak Daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Apabila Pendapatan Asli Daerah meningkat, maka akan dapat mengurangi ketergantungan terhadap Dana Perimbangan serta menjadikan Kota Bandung layak disebut kota jasa yang mandiri sesuai dengan visinya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai : **“Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Sektor Bioskop dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam Menunjang Kemandirian Daerah Pada Kota Bandung”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka peneliti merumuskan dan membatasi masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penerimaan Pajak Hiburan sektor Bioskop pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung tahun 2010
2. Bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Hiburan sektor Bioskop terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota Bandung
3. Bagaimana kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap tingkat kemandirian daerah pada Kota Bandung

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, maka maksud dari penelitian ini adalah menganalisis efektivitas Pajak Hiburan sektor Bioskop dan besarnya kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dalam menunjang kemandirian daerah pada kota Bandung.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui efektivitas penerimaan Pajak Hiburan sektor Bioskop pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung tahun 2010
2. Mengetahui kontribusi penerimaan Pajak Hiburan sektor Bioskop terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota Bandung
3. Mengetahui gambaran tingkat kemandirian daerah pada Kota Bandung

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri dan dapat dijadikan bahan kajian dan pengembangan penelitian lebih lanjut.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi serta masukan bagi Pemerintah Kota Bandung untuk dapat lebih meningkatkan kinerjanya, terutama dalam mengelola penerimaan pajak daerah, khususnya pajak bioskop, serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya supaya kota Bandung menjadi daerah yang mandiri.